

Ruang Lingkup Komunikasi Kekuasaan dan Wewenang pada Perusahaan Perkebunan

Selamat Riadi¹, Dedi Sahputra^{1*}, Taufik Wal Hidayat¹, Effi Juliana Hasibuan¹

Universitas Medan Area

Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Medan 20223 - Indonesia

*Corresponding Author: dedi_sahputra@staff.uma.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.25008/jpi.v4i2.117>

Submitted: 22 Agustus 2022 Revised: 19 Oktober 2022 Published: 31 Oktober 2022

Abstract

Communication of desire power at the pinnacle of achievement, especially leading in companies with hopes and getting full authority in making decisions This study uses a descriptive method in a qualitative approach, the object of research is plantation companies with research subjects' workers with the scope of communication of power and authority in plantation assistants at PTPN III. The strategic management theory approach is used because it is seen as relevant due to the emphasis on aspects of reciprocal and sustainable relationships between stages in managerial communication strategy. The results of the study state that the power and authority of a leader is the result of a dynamic process that fits the needs of the group. In general, traditional community leaders are leaders behind or in the middle. It's rare to be a leader at the front. When viewed from the situation in big cities, the structure of society requires leadership that is different from the leadership of traditional communities. City community leadership can no longer be carried out through personal relationships, but rational wisdom is more needed. The authority of a leader requires wisdom and wisdom in leading an organization. The style of a leader communicates differently from the trait approach which emphasizes the leader's personal charisma and is also different from the expertise approach which only emphasizes the bureaucracy alone but how a leader acts towards his subordinates who look at the situation, namely putting on general behavior and work behavior.

Keywords: Organizational Communication; Power; Authority

Abstrak

Komunikasi kekuasaan keinginan dalam puncak prestasi terlebih memimpin di perusahaan dengan harapan dan mendapatkan kewenangan penuh dalam mengambil keputusan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif, objek penelitian perusahaan perkebunan dengan subjek penelitian para pekerja dengan ruang lingkup komunikasi kekuasaan dan wewenang di asisten kebun di PTPN III. Pendekatan teori manajemen strategis digunakan karena dipandang relevan karena adanya penekanan pada aspek hubungan timbal balik dan berkelanjutan antara tahapan-tahapan dalam manajerial strategi komunikasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kekuasaan dan wewenang seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan kelompok. Pada umumnya para pemimpin masyarakat tradisional adalah pemimpin di belakang atau di tengah. Jarang sekali yang menjadi pemimpin di depan. Apabila ditinjau keadaan di kota-kota besar, susunan masyarakatnya menghendaki kepemimpinan berbeda dengan kepemimpinan masyarakat tradisional. Kepemimpinan masyarakat kota tak lagi dapat dilaksanakan melalui hubungan pribadi, melainkan kebijaksanaan rasional yang lebih diperlukan. Kewenangan seorang pemimpin diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam memimpin suatu organisasi. Gaya seorang pemimpin berkomunikasi berbeda dengan pendekatan sifat yang menekan pada kharismatik pribadi pemimpin juga berbeda dengan pendekatan keahlian yang hanya menekan kepada birokrasi semata namun bagaimana seorang pemimpin bertindak terhadap anak buahnya yang melihat pada situasi yaitu meletakkan pada perilaku umum dan perilaku kerja.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi; Kekuasaan; Wewenang.

Pendahuluan

Komunikasi merupakan mata rantai yang tersentralisasi memberikan jalinan kekuatan kekuasaan dalam mengorganisir

semua pihak yang ada di garis atasan dan bawahannya. Dalam hal komunikasi politik, (Mulyana, 2014) lazimnya disebut sebagai suatu proses linier atau dengan kata

lain disebut sistem yang berorientasi pada efek ataupun pengaruh dari pesan politik. Komunikasi politik juga melibatkan pesan dan aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Manakala (Hiariej & Stokke, 2018) menyebut istilah politik kewargaan untuk menyebut gerakan-gerakan kemerdekaan modern yang didahului oleh rezim-rezim tradisional.

Komunikasi politik selanjutnya berkembang menjadi bidang akademik penyelidikan, yang berlandaskan teoritis dan metode berasal dari komunikasi, ilmu politik, sosiologi, psikologi, pemasaran, sejarah, retorika, dan lainnya (Saepudin & Kawuryan, 2022). Dalam percakapan sehari-hari, masalah kekuasaan dan wewenang sering dibicarakan orang, demikian juga dengan media massa, yang setiap hari memuat berita-berita mengenai unsur kemasyarakatan itu.

Persoalan-persoalan yang ada perihal kekuasaan dan wewenang ini tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sederhana, atau mudah untuk dipecahkan; hanya sayangnya, sosiologi bukan merupakan ilmu yang secara langsung dapat memecahkan masalah-masalah tentang kekuasaan dan wewenang, peranan sosiologi di sini sebatas memberi gambaran tentang fenomena sosial yang terjadi, bagaimana bisa terjadi, apa pengaruhnya kemudian, kekuatan-kekuatan apa yang ada di belakang fenomena itu, bagaimana kekuatan-kekuatan itu dapat mempengaruhi orang banyak, dan seterusnya. Dalam hal ini (Syahputra, 2019) menggarisbawahi *public relations* dan *media relations* sebagai dua konsep kunci. Jika *public relations* sebagai Langkah korporasi, maka *media relations* adalah manajemen komunikasi untuk membuat korporasi menjadi transparan dan responsif terhadap publik internal dan eksternal.

Komunikasi kekuasaan dan wewenang menjadi sangat mendukung untuk memberikan pemahaman bahwa di perkebunan memiliki kebiasaan karier

planning Sehingga seorang calon asisten dapat memahami bahwa ini merupakan sistem yang mengikat di dunia perkebunan dan membiasakan perilaku menjadi seorang asisten. Namun dalam proses perkembangannya tidak semua pemimpin mampu beradaptasi dengan di lingkungan kebun Hhal ini dapat ditunjukkan banyaknya mengundurkan diri dari jabatan yang diberikan yang disebabkan berapa faktor kenyamanan kerja, serta bawahan yang dipimpin belum dapat menerimanya.

Secara tradisional, kekuasaan dan wewenang menjadi ruang lingkup yang khusus dari ilmu politik; akan tetapi karena kekuasaan dan wewenang adalah salah satu dimensi dari masyarakat, maka kekuasaan dan wewenang dapat pula menjadi obyek penyelidikan dari sosiologi. Hasil analisa (Wiber 2015) yang dilakukan oleh Max Weber tahun 1958, merangsang para ahli-ahli sosial untuk terus mengadakan penelitian terhadap unsur-unsur kekuasaan dan wewenang yang selama itu agak diabaikan oleh para ahli ilmu politik.

Sosiologi memandang kekuasaan dan wewenang ini sebagai suatu gejala yang netral; kekuasaan dan wewenang bukan suatu gejala yang buruk maupun baik, kecuali dalam penerapannya. Dengan meniadakan nilai tersebut, sosiologi berharap dapat melakukan analisa dengan sebanyak mungkin menetralisasikan unsur-unsur yang bersifat subyektif.

Onong (1999) menyatakan proses komunikasi menurutnya terbagi menjadi dua tahap, yaitu: (1) Proses komunikasi secara primer, yakni proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna yang secara langsung mampu menterjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan.

Bahasa adalah yang paling banyak digunakan dalam proses komunikasi secara primer karena hanya bahasalah yang mampu menterjemahkan pikiran dan

perasaan orang lain baik berupa ide, informasi dan opini. Sedangkan isyarat, gambar dan warna digunakan dalam keadaan tertentu untuk mendukung media bahasa dalam penyampaian pesan atau pikiran yang akan disampaikan dan diterima; (2) Proses komunikasi secara sekunder, adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak.

Perbedaan komunikasi dan kekuasaan terletak pada tujuannya atau efek yang diharapkan. Ditinjau dari efek yang diharapkan itu, tujuan komunikasi sifatnya umum, sedangkan tujuan pendidikan sifatnya khusus. Tujuan kekuasaan adalah khas atau khusus, yaitu meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai suatu hal sehingga ia menguasainya. Jelas perbedaannya dengan tujuan penerangan, propaganda, indoktrinasi dan agitasi sebagaimana disinggung di atas.

Tujuan kekuasaan dan wewenang akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Pada umumnya pendidikan berlangsung secara berencana di dalam kelas secara tatap muka (*face to face*). Karena kelompoknya relatif kecil. Meskipun komunikasi antara pelajar dan pengajar dalam ruang kelas itu termasuk komunikasi kelompok, sang pelajar sewaktu-waktu bisa mengubahnya menjadi komunikasi antarpersona. Terjadilah komunikasi dua arah atau dialog di mana si pelajar menjadi komunikan dan komunikator, demikian pula dengan bawahan.

Terjadinya komunikasi dua arah ini ialah apabila para pekerja bersikap responsif, mengetengahkan pendapat atau mengajukan saran, diminta atau tidak diminta. Jika pekerja tidak ada repon dalam keseharian dalam arti kata hanya

mendengarkan saat rapat dan tak ada gairah untuk mengekspresikan suatu pendapatnya, maka meskipun komunikasi itu bersifat tatap muka, tetap saja berlangsung satu arah dan komunikasi itu tidak efektif.

Kerangka Teori

Pendekatan teori manajemen strategis dipandang relevan digunakan pada studi ini karena adanya penekanan pada aspek hubungan timbal balik dan berkelanjutan antara tahapan-tahapan dalam manajerial strategi komunikasi (Sudarman, 2018). Dalam konteks ini pencapaiannya adalah kesadaran dari masyarakat dalam komunikasi organisasi internal dan eksternal di PTPN 3 Unit Usaha Kebun Sei Putih Kabupaten Deli Serdang sangat memerlukan suatu strategi komunikasi yang berkelanjutan.

Manajemen strategi dimaknai sebagai suatu seni atau keterampilan, juga teknik serta ilmu dalam memformulasikan, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi maupun dalam hal mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi (bisnis dan non bisnis) yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, yang senantiasa berubah sehingga dengan demikian dapat memberikan kemampuan kepada organisasi dalam mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Pentingnya manajemen strategi menjadi sangat dominan, karena dapat menjadi peluang atau bahkan ancaman bagi suatu Lembaga (Setiawati, 2020).

Chaniago (2014) merangkum manajemen strategi dari beberapa sumber terkait ragam pemahaman dan pengertian strategi oleh para ahli manajemen, di antaranya Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer (1995), mendefinisikan strategi dengan 5P, yaitu: strategi sebagai Perspektif, Posisi, Perencanaan, Pola Kegiatan, dan Penipuan.

Pertama, sebagai Perspektif, strategi dijelaskan bahwa setiap aktivitas yang dirumuskan atau dilakukan harus mengacu kepada misi yang dilaksanakan. Jika

sampai keluar dari misi tersebut maka akan membuat tidak terarah kegiatan, sehingga perencanaan yang telah dibuat tidak dapat terlaksana dengan baik.

Kedua, sebagai Posisi. Maknanya adalah kemampuan organisasi dalam menempatkan beberapa pilihan agar keberadaan mereka bisa menjadi perhatian pihak atau orang yang terkait dengan kegiatan yang sedang dilakukan.

Ketiga, Perencanaan, adalah rumusan yang sistematis tentang langkah atau Tindakan yang akan dilakukan yang berdasarkan dengan pertimbangan seksama atas potensi, faktor eksternal serta pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ada hal-hal yang menjadi prinsip dalam perencanaan, yaitu: (1) apa yang hendak dilakukan; (2) bagaimana cara dalam mencapai tujuan; (3) siapa yang ditunjuk melakukan hal tersebut; (4) bagaimana dengan lokasi aktivitas; (5) waktu pelaksanaan, serta masa yang dibutuhkan berapa lama; (6) serta apa sumber daya yang diperlukan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti pendekatan kualitatif, sama sekali tidak menggunakan dukungan data kualitatif akan tetapi penekannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

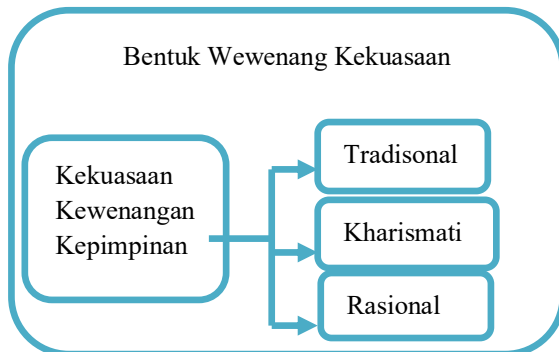
Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan, melakukan studi lapangan, serta studi dokumentasi. Informan menurut Moleong (2014) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan berkewajiban

secara sukarela menjadi anggota tim walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebbaikannya dan dengan sukarelanya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan menjadi latar peneliti.

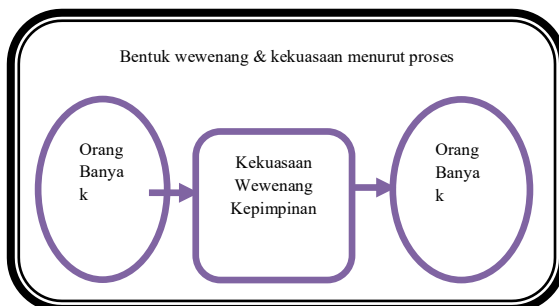
Hasil dan Pembahasan

Penjelmaan kekuasaan dan wewenang menurut Wiber (2015) pada diri seseorang biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang ialah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Apabila setiap masyarakat akan menjadi kaku karena tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi di dalam masyarakat.

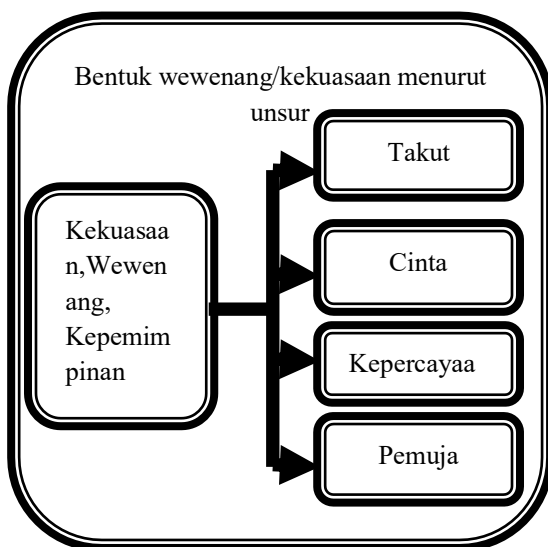
Adanya wewenang hanya dapat efektif bila didukung kekuasaan yang nyata, tetapi acapkali terjadi letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata tidak di satu tangan. Di masyarakat yang kecil dan yang susunannya bersahaja, umumnya kekuasaan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang meliputi bermacam bidang. Kekuasaan itu lambat laun diidentifikasi dengan orang yang memegangnya. Adanya kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat merupakan gejala yang wajar. Walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat memerlukan faktor pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi.



Gambar 1. Bentuk Wewenang Kekuasaan
Sumber: Max Wiber 2015



Gambar 2. Proses wewenang dan kekuasaan
Sumber: Max Wiber 2015



Gambar 3. Bentuk unsur kekuasaan dan wewenang
Sumber: Max Wiber 2015

Sebagai suatu proses, baik kekuasaan maupun wewenang merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial. Mengenai pengaruh tersebut, lazimnya diadakan pembedaan di antaranya;

Pertama, pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasif.

Kedua, pengaruh tergantung atau tidak bebas menjadi efektif karena ciri tertentu yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berpengaruh. Pada jenis pengaruh ini, mungkin terjadi proses-proses sebagai berikut:

Pihak yang berpengaruh membantu pihak yang dipengaruhi untuk mencapai tujuannya, atau pihak yang berpengaruh mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya;

Pihak yang berpengaruh mempunyai ciri-ciri tertentu yang menyebabkan pihak lain terpengaruh olehnya. Ciri-ciri tersebut adalah: Kelebihan di dalam kemampuan dan pengetahuan; Sifat dan sikap yang dapat dijadikan pedoman perilaku yang pantas atau perilaku yang diharapkan; Mempunyai kekuasaan resmi yang sah.

Kekuasaan. Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai suatu yang baik atau buruk, namun sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat.

Kekuasaan ada dalam setiap bentuk masyarakat, baik yang bersahaja maupun masyarakat yang kompleks;

Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan perkataan lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu, dengan rela atau karena terpaksa.

Apabila kekuasaan dijemalkan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.

Wewenang. Adalah kekuasaan yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat.

Saluran Kekuasaan dan Dimensinya

Dalam setiap hubungan antara manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Untuk sementara pembahasan dibatasi pada

kekuasaan, yang diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan.

Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat atas kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Hal tersebut sebagai berikut:

Rasa Takut

Perasaan takut pada seseorang (yang merupakan penguasa, misalnya) menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tadi. Rasa takut merupakan perasaan negatif karena seseorang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Orang yang mempunyai rasa takut akan berbuat segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang yang ditakutinya agar terhindar dari kesukaran-kesukaran yang akan menimpa dirinya, seandainya dia tidak patuh. Rasa takut juga menyebabkan orang yang bersangkutan meniru tindakan-tindakan orang yang ditakutinya. Gejala ini dinamakan *matched dependent behavior*, yang tak mempunyai tujuan kongkret bagi yang melakukannya. Rasa takut merupakan gejala universal yang terdapat di mana-mana dan biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat yang mempunyai pemerintahan otoriter.

Rasa Cinta

Rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya

positif. Orang-orang lain bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa untuk menyenangkan semua pihak. Artinya ada titik-titik pertemuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Rasa cinta biasanya telah mendarah daging (*internalized*) dalam diri seseorang atau sekelompok orang. Rasa cinta yang efisien seharusnya dimulai dari pihak penguasa. Apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai, kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur.

Kepercayaan

Kepercayaan sangat sentral dalam kehidupan manusia dan kepercayaan menjadi alat ukur serta urat nadi dalam kehidupan manusia. Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Misalnya, B sebagai orang yang dikuasai mengadakan hubungan langsung dengan A sebagai pemegang kekuasaan. B percaya sepenuhnya kepada A kalau A akan selalu bertindak dan berlaku baik.

Dengan demikian, setiap keinginan A atau selalu dilaksanakan oleh B. Kemungkinan sekali bahwa B sama sekali tidak mengetahui kegunaan tindakan-tindakannya itu. Akan tetapi karena dia telah menaruh kepercayaan kepada si A, dia akan berbu hal-hal yang sesuai dengan kemauan A yang merupakan penguasa agar A semakin memercayai B. Pada contoh tersebut, hubungan yang terja bersifat pribadi, tetapi mungkin saja hubungan demikian akan berkembang di dalam suatu organisasi atau masyarakat secara luas. maka kepercayaan memang sangat penting demi kelanggengan suatu kekuasaan.

Pemujaan

Sistem kepercayaan mungkin masih dapat disangkal oleh orang-orang lain. Akan tetapi, di dalam sistem pemujaan, seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar pemuja dari orang-orang lain. Akibatnya

adalah segala tindakan penguat dibenarkan atau setidaknya dianggap benar.

Apabila dilihat dalam masyarakat, kekuasaan di dalam pelaksanaan dijalankan melalui saluran-saluran tertentu. Saluran-saluran tersebut banyak sekali, tetapi kita hanya akan membatasi diri pada saluran-saluran sebagai berikut:

Saluran Militer. Apabila saluran ini yang dipergunakan, penguasa akan lebih barani mempergunakan paksaan (*corcion*) serta kekuatan militer (*military force*) di dalam melaksanakan kekuasaannya. Tujuan utama ada untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk kepada kemauan penguasa atau sekelompok orang-orang yang dianggap sebagai penguasa. Untuk keperluan tersebut, sering kali dibentuk organisasi-organisasi atau pasukan-pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia. Hal ini banyak dijumpai pada negara-negara totaliter.

Saluran Ekonomi. Dengan menggunakan saluran-saluran di bidang ekonomi, penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat. Dengan jalan menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat tersebut, penguasa dapat melaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan perintah-perintahnya dengan dikenakan sanksi-sanksi yang tertentu.

Saluran Politik. Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Caranya adalah, antara lain, dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan yang sah.

Saluran Tradisional. Saluran tradisional biasanya merupakan saluran yang paling disukai. Dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal di dalam sesuatu masyarakat, pelaksanaan

kekuasaan dapat berjalan dengan lebih lancar.

Saluran Ideologi. Penguasa-penguasa dalam masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin, yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Hal itu dilakukan supaya kekuasaan dapat menjelma menjadi wewenang.

Saluran-saluran lainnya. Selain saluran-saluran lain di yang telah disebutkan di atas. yang dapat dipergunakan penguasa, misalnya alat-alat media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain-lainnya. Selain itu, dapat pula dipergunakan saluran rekreasi yang biasa digunakan masyarakat mengisi waktu senggangnya. Akan tetapi, tergantung pada struktur yang bersangkutan. Misalnya pada masyarakat tradisional, tradisi akan lebih berhasil dalam meyakinkan masyarakat misalnya saluran militer. Apabila dimensi kekuasaan ditelaah, ada kemungkinan-kemungkinan di antaranya.

Hakikat Kekuasaan dan Sumbernya

Secara formal negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi. Kalau perlu, dengan paksaan. Juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya. Itulah yang dinamakan kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat yang menamakan diri *the ruling class*. Ini merupakan gejala yang umum dalam setiap masyarakat.

Dalam kenyataan, di antara orang-orang yang merupakan warga *the ruling class*, pasti ada yang menjadi pemimpinnya, meskipun menurut hukum dia tidak merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi. Misalnya pada negara-negara yang berbentuk kerajaan, sering terlihat kenyataan bahwa seorang perdana menteri mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari raja dalam menjalankan kedaulatan negara.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sifat hakikat kekuasaan dapat terwujud dalam hubungan yang simetris dan asimetris. Masing masing hubungan terwujud dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat diperoleh dengan gambaran sifat dan hakikat kekuasaan sebagai berikut:

Simetris. Hubungan persahabatan; Hubungan sehari-hari; Hubungan yang bersifat ambivalen; Pertentangan antara mereka yang sejajar kedudukannya.

Asimetris; Popularitas; Peniruan; Mengikuti Perintah; Tunduk pada pemimpin formal dan informal; Tunduk pada seorang ahli; Pertentangan antara mereka yang tidak sejajar kedudukannya; Hubungan sehari-hari.

Kekuasaan berhubungan erat dengan iklim komunikasi dengan kepuasan, iklim yang menandai bahwa beberapa sifat dalam organisasi, bagaimana menggambarkan pribadi di dalam pemimpin berkomunikasi, sedangkan kepuasan berkenaan dengan kepuasan yang berarti nyaman dengan demikian isi pesan yang dilakukan seorang pemimpin memberikan efek internal dan positif terhadap bawahannya.

Wewenang

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada di satu tangan. Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangann. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaan.

Dipandang dari sudut masyarakat, kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang. Wewenang hanya mengalami perubahan dalam bentuk. Berdasarkan kenyataannya wewenang tadi tetap ada. Perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan masyarakat. Wewenang ada beberapa bentuk, sebagai berikut.

Wewenang Kharismatis, Tradisional, dan Rasional (Legal). Perbedaan antara wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal) dikemukakan oleh Max Weber. Perbedaan tersebut didasarkan pada hubungan antara tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Di dalam membicarakan ketiga bentuk wewenang tadi, Max Weber memerhatikan sifat dasar wewenang tersebut karena itulah yang menentukan kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut.

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (*wahyu, pulung*) yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat orang tersebut karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut merupakan sesuatu yang berada diatas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. Manfaat serta kegunaan sumber kepercayaan dan pemujaan karena kemampuan khusus tadi pernah terbukti bagi masyarakat.

Wewenang kharismatis tersedut akan dapat tetap bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya bagi seluruh masyarakat. Contohnya nabi, para rasul, penguasa-penguasa terkemuka dalam sejarah, dan seterusnya. Wewenang kharismatis berwujud suatu wewenang untuk diri orang itu sendiri dan dapat

dilaksanakan terhadap segolongan orang atau bahkan terhadap bagian terbesar masyarakat. Jadi, dasar wewenang kharismatis bukanlah terletak pada suatu peraturan (hukum), tetapi bersumber pada diri pribadi individu bersangkutan. Kharisma semakin meningkat sesuai dengan kesanggupan individu yang bersangkutan untuk membuktikan manfaatnya bagi masyarakat, dan pengikut-pengikutnya akan menikmatinya. Wewenang kharismatis dapat berkurang bila ternyata individu yang memilikinya berbuat kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi berkurang.

Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang maupun sekelompok orang. Dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang tadi dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatis, tetapi karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahkan menjiwai masyarakat. Demikian lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan hingga membuat masyarakat percaya clan mengakui kekuasaannya.

Di dalam masyarakat yang demokratis sesuai dengan sistem hukumnya, orang yang memegang kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas. Gunanya adalah supaya orang-orang yang memegang kekuasaan tadi akan dapat menyelenggarakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemungkinan orang-orang tertentu secara terus-menerus memegang kekuasaan dalam jangka waktu lama seperti halnya pada masyarakat tradisional kecil sekali karena kemungkinan semacam itu akan

menghambat keinginan clan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Apabila ketiga bentuk wewenang tersebut ditelaah lebih mendalam, akan terlihat bahwa ketiga-tiganya dapat dijumpai dalam masyarakat, walau mungkin hanya salah satu bentuk saja yang menonjol. Di dalam suatu masyarakat yang hidup tenang dan stabil, umumnya wewenang tradisional yang legal amat mengedepan. Dengan meluasnya sistem demokrasi, wewenang tradisional yang diwujudkan dengan kekuasaan turun-temurun kelihatannya semakin berkurang.

Menurut Wiber (2015). pendapat bahwa ada kecenderungan dari wewenang kharismatis (yang berkurang kekuatannya bila keadaan masyarakat berubah) untuk dijadikan kekuasaan tetap dengan mengabadikan kepentingan serta cita-cita para pengikut pemimpin kharismatis tadi ke dalam kehidupan bersama kelompok, dan kepentingan untuk mempererat hubungan satu dengan lainnya. Masalah akan timbul bila yang memiliki kharisma sudah tak ada lagi. Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu antara lain:

Pertama, mencari seseorang yang mampu untuk memenuhi ukuran-ukuran atau kriteria wewenang kharismatis sebagaimana ditentukan oleh masyarakat, dengan mengadakan penyaringan atau seleksi, seseorang yang mempunyai wewenang kharismatis, menunjuk penggantinya serta mengakui kekuasaannya, di mana masyarakat luas juga mengakuinya penunjukan oleh pembantu-pembantu penguasa terdahulu yang dipercayai oleh masyarakat

Kedua, menciptakan suatu sistem kepercayaan bahwa kharisma dapat diwariskan kepada keturunan atau seseorang yang masih ada hubungan keluarga dengan orang yang mempunyai kharisma tersebut.

Ketiga, menciptakan sistem kepercayaan bahwa dengan upacara-upacara tradisional tertentu, kharisma dapat dialihkan kepada orang lain.

Proses perubahan wewenang kharismatis menjadi kekuasaan dan wewenang yang tetap tidak mustahil menimbulkan pertikaian-pertikaian. Bagi penganut wewenang kharismatis, kadang-kadang tidaklah mudah untuk melupakan kenyataan bahwa wewenang tersebut pernah melekat pada diri *clan* pribadinya. Akan tetapi, hal ini bukanlah merupakan penghalang besar terutama pada masyarakat modern karena warga masyarakat umumnya rasional dan menghendaki suatu landasan hukum yang kuat pada wewenang yang berlaku di dalam masyarakat. Kesulitan-kesulitan mungkin akan dijumpai pada masyarakat-masyarakat bersahaja yang masih memelihara sistem kepercayaan.

Wewenang Resmi dan Tidak Resmi. Di dalam setiap masyarakat akan dapat dijumpai aneka macam bentuk kelompok. Dalam kehidupan kelompok-kelompok tadi sering kali timbul masalah tentang derajat resmi suatu wewenang yang berlaku di dalamnya. Sering kali wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut sebagai wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional dan, didasarkan pada faktor saling mengenal. Wewenang demikian tidak diterapkan secara sistematis. Keadaan semacam ini dapat dijumpai, misalnya, pada ciri seorang ayah dalam fungsinya sebagai kepala rumah tangga atau pada diri seorang guru yang sedang mengajar di muka kelas. Wewenang tidak resmi biasanya timbul dalam hubungan-hubungan antarpribadi yang sifatnya situasional, dan sangat ditentukan oleh kepribadian para pihak.

Wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Biasanya wewenang tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Di dalam kelompok tadi, karena banyaknya anggota, biasanya hak serta kewajiban para anggotanya, kedudukan serta peranan, siapa-siapa yang menetapkan kebijaksanaan dan siapa pelaksananya, dan seterusnya ditentukan

dengan tegas. Walau demikian, dalam kelompok-kelompok besar dengan wewenang resmi tersebut, mungkin saja ada wewenang yang tidak resmi.

Tidak semuanya dijalankan atas dasar peraturan-peraturan resmi yang sengaja dibentuk. Bahkan demi lancarnya suatu perusahaan besar, misalnya, kadangkala prosesnya didasarkan pada kebiasaan atau aturan-aturan yang tidak resmi. Contohnya dapat dilihat pada seorang sekretaris direktur punya wewenang tidak resmi yang besar. Demikian pula dalam suatu lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana tertentu lebih ditakuti oleh rekan-rekannya daripada pegawai lembaga pemasyarakatan yang mempunyai wewenang resmi. Sebaliknya di dalam kelompok-kelompok kecil mungkin saja ada usaha-usaha untuk menjadikan wewenang tidak resmi menjadi resmi karena terlalu seringnya terjadi pertikaian antar anggota.

Wewenang Pribadi dan Teritorial. Pembedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial sebenarnya timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul karena faktor ikatan darah, atau mungkin juga karena faktor ikatan tempat-tinggal, atau karena gabungan kedua faktor tersebut. Di Indonesia dikenal kelompok-kelompok atas dasar ikatan darah, misalnya marga. Sebaliknya dikenal pula nama desa, yang lebih didasarkan pada faktor teritorial.

Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok, dan di sini unsur kebersamaan sangat memegang peranan. Para individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban ketimbang hak. Struktur wewenang bersifat konsentris, yaitu dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang tertentu. Setiap lingkaran wewenang dianggap mempunyai kekuasaan penuh di wilayahnya masing-masing. Apabila bentuk wewenang ini dihubungkan dengan ajaran Max Weber, wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi daripada peraturan-peraturan. Juga

mungkin didasarkan pada kharisma seseorang.

Pada wewenang teritorial, wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Pada kelompok-kelompok teritorial unsur kebersamaan cenderung berkurang karena desakan faktor-faktor individualisme. Hal ini tidaklah berarti bahwa kepentingan perorangan diakui dalam kerangka kepentingan bersama. Pada wewenang teritorial ada kecenderungan untuk mengadakan sentralisasi wewenang yang memungkinkan hubungan langsung dengan para warga kelompok. Walaupun di sini dikemukakan perbedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial, di dalam kenyataannya kedua bentuk wewenang tadi dapat saja hidup berdampingan.

Pada desa-desa di Jawa, misalnya, wewenang teritorial lebih berperan di samping ada kecenderungan-kecenderungan untuk mengakui wewenang dari golongan pemilik tanah (*kuli kenceng*) dan sifatnya turun temurun dan didasarkan pada ikatan atau hubungan darah. Akan tetapi, ada pula kenyataan-kenyataan yang membuktikan terdapat wewenang-wewenang pribadi teritorial yang murni sifatnya.

Wewenang Terbatas dan Menyeluruh. Suatu dimensi lain dari wewenang adalah perbedaan antara wewenang terbatas dengan wewenang menyeluruh. Apabila dibicarakan tentang wewenang terbatas, maksudnya adalah wewenang tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, tetapi hanya terbatas pada salahsatu sektor atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia, mempunyai wewenang untuk atas nama negara dan mewakili masyarakat menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana. Namun, jaksa tidak berwenang mengadilinya. Contoh lain adalah seorang menteri dalam negeri, tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan-urusan yang menjadi wewenang menteri luar negeri. Wewenang semacam ini sebenarnya lazim, terutama dalam

masyarakat yang sudah rumit susunan clan organisasinya. Namun demikian, wewenang yang menyeluruh juga suatu ciri dari suatu negara.

Menurut Soekanto (2017) sekurangnya birokrasi itu mencakup lima unsur penting, yaitu organisasi. Organisasi merupakan satu cara untuk mengumpulkan tenaga serta membagi-bagikan kekuasaan dan wewenang di dalam pengumpulan tenaga tersebut dan apabila dilihat dari pembagian kekuasaan tersebut, maka di dalam suatu organisasi terdapat penguasa dan mereka yang dikuasai; hierarki, yaitu urutan-urutan kekuasaan secara vertikal atau bertingkat dari atas ke bawah; ada pembagian tugas yang horisontal, yaitu pembagian tugas antara beberapa bagian, dimana bagian-bagian tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang setingkat atau sederajat; ada suatu kelompok sosial.

Suatu pembagian kekuasaan yang vertikal adalah urutan-urutan dari kepala, wakil kepala, sekretaris dan seterusnya sampai pegawai rendah; itu semua merupakan saluran yang membawa perintah dari atas ke bawah, akan tetapi juga merupakan saluran untuk membawa keinginan –keinginan dari bawah ke atas, saluran ini merupakan jalur lalu lintas dari dua arah (*two way traffic*).

Pembagian kekuasaan yang horisontal tidak menyebabkan perbedaan tingkat kedudukan, akan tetapi lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan dan wewenang secara mendatar yang terutama dilandaskan pada pembagian kerja dan spesialisasi. Setiap bagian dari pembagian kerja dan spesialisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinir oleh kedudukan yang lebih tinggi derajatnya dan demikian seterusnya dari atas.

Di dalam organisasi tersebut ada unsur pimpinan dan ada yang dipimpin. Pemimpin mungkin ada pada diri seseorang atau sekelompok orang. Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi merasa dirinya sebagai bagian dari kesatuan tersebut, dan bagi mereka yang telah tersedia peraturan-peraturan tertentu, yang hanya berlaku bagi

anggota-anggotanya. Karena itu, maka kesemuanya sebagai suatu kesatuan disebut suatu kelompok sosial.

Penggerakan tenaga. Penggerakan tenaga dimaksudkan sebagai pengaturan tenaga-tenaga secara organisatoris untuk melaksanakan suatu tugas tertentu; tenaga di sini meliputi baik tenaga kasar, yaitu meliputi tenaga-tenaga fisik yang mengandalkan pada keterampilan tangan, maupun tenaga ahli, yaitu tenaga-tenaga nonfisik yang lebih menggunakan tenaga fikiran.

Sifatnya yang teratur. Teratur disini berarti aktifitasnya berlandaskan pada tata tertib tertentu atau atas dasar peraturan-peraturan tertentu; dalam tertib ini maka seseorang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lingkungan pekerjaan, hubungan kerja dengan bagian-bagian lain, beserta tanggung jawabnya

Bersifat terus menerus. Di samping harus adanya peraturan-peraturan yang formal, hal tentang disiplin kerja juga harus mendapat perhatian penting, yaitu berupa ketaatan untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan. Ada kalanya peraturan-peraturan formil belum ada, namun disiplin kerja harus sudah ada; penggerakan tenaga kerja ini harus berlaku secara terus menerus

Mempunyai tujuan. Birokrasi merupakan suatu organisasi di dalam masyarakat, demikian kata Max Weber. Oleh karena itu birokrasi tidak boleh menyimpang dari dasar-dasar kehidupan yang telah ditentukan; keberadaan birokrasi tentu tidak lepas dari tujuan-tujuan, dan untuk sampai pada harapan-harapan itu roda keberjalanan suatu birokrasi harus sesuai dengan tujuan yang semula.

Dalam pandangannya tentang birokrasi, Max Weber sebenarnya khawatir akibat-akibat perkembangan birokrasi yang sangat pesat pada dewasa ini. Setiap petugas mendapatkan tempat tertentu yang tetap, sebagai mana ibaratnya manusia adalah sebuah roda bergigi dalam sebuah mesin, apabila manusia tersebut

telah sadarkan kedudukannya, maka dia akan berusaha untuk menjadi roda sebuah mesin. Gejala tersebut disebabkan karena manusia terlalu terikat oleh adanya suatu tata-tertib, sehingga manakala tata-tertib itu terabaikan atau bahkan tidak ada karena perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka dia tidak tahu lagi bentuk apa yang akan dijadikan dasar pegangannya.

Suatu wewenang menyeluruh berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Suatu contoh adalah, misalnya, setiap negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Jadi, terbatasnya atau menyeluruhnya suatu wewenang bersifat tergantung dari sudut penglihatan pihak-pihak yang ingin menyorotinya. Kedua bentuk wewenang tadi dapat berproses secara berdampingan, dimana pada situasi tertentu, salah satu bentuk lebih berperan dari pada bentuk lainnya.

Membangun Komunikasi

Berkomunikasi dengan orang lain merupakan kebutuhan biologis setiap orang seperti makan dan minum, dan memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan kebahagiaan. Melalui komunikasi pula kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental kita. Hal tersebut bagaimana kita berdialog. Dalam hal ini komunikasi yang dibangun di komunitas perkebunan dalam sejarah, memiliki strata tersendiri.

Dalam konteks komunikasi nonverbal dalam kajian pascakolonial dapat dikatakan sebagai bahasa, media, alat berkomunikasi antara budaya penjajah dan yang terjajah. (Wulan, 2015). Akan halnya proses komunikasi yang berjalan dalam lingkungan dinasti politik, juga memiliki berbagai dampak atau umpan balik (Adita & Ruliana, 2022).

Menurut Friere dalam Dharma (2016) Dialog tidak pernah terjadi apabila prasyarat untuk melakukan dialog tidak terpenuhi. Dialog merupakan situasi belajar

yang mewajibkan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut:

Pertama, perhubungan dialogis. Menurut Preire, perhubungan dialogis merupakan situasi belajar yang esensial bagi proses mengetahui. Perhubungan dialogis adalah komunikasi dan interkomunikasi antara orang kebal terhadap birokrasi kesadaran dan terbuka untuk penemuan dan untuk mengetahui lebih banyak.

Kedua, cinta. Dialog merupakan laku penciptaan dunia oleh para manusia yang mencintai dunia, mencintai sesama manusia dan mencintai kehidupan. Cinta merupakan pondasi dari dialog.

Ketiga, kerendahan hati. Dialog tidak dapat terwujud tanpa kerendahan hati. Penamaan dunia, proses orang-orang merekreasi dunia secara menetap, tidak dapat berupa suatu tindakan arogansi.

Keempat, keyakinan mendalam terhadap manusia. Syarat dialog selanjutnya adalah keyakinan, yakin terhadap manusia yang mampu menamai dunia, merkreasi dunia, serta mewarnai dunia dengan segala potensi yang beragam. Dialog hanya bisa terjadi dengan keyakinan terhadap fitrah manusia sebagai makhluk yang otonom, memiliki kemampuan untuk subjek-subjek yang memiliki daya transformatif.

Kelima, kepercayaan. Mendasarkan pada cita, kerendahan hati dan keyakinan, maka dialog akan menjadi sebuah bentuk hubungan horizontal di mana sifat saling mempercayai diantara pelakunya merupakan konsekuensi logis.

Keenam, harapan. Dialog merupakan laku para subjek yang mencintai kehidupan, kehidupan yang mengharapkan perubahan-perubahan yang lebih baik, Harapan berakar dalam ketidaksempurnaan manusia, dari sini harapan bergerak dengan pencarian terus menerus sebuah pencarian yang hanya dapat dilaksanakan melalui dialog dengan orang lain membisu, melemah, tenggelam, bahkan lari dari kenyataan.

Ketujuh, pemikiran kritis. Dialog yang benar tidak dapat terjadi jika para partisipan tidak terlihat dalam berpikir kritis. memandang bahwa: “Pemikiran kritis adalah pemikiran yang melihat suatu hubungan tak terpisah antara manusia dan dunia tanpa melakukan dikhotomi diantara keduanya- pemikiran yang memandang realitas sebagai proses dan perubahan, ketimbang sebagai suatu entitas yang statis, pemikiran yang tidak memisahkan pemikiran itu sendiri dari tindakan, tetapi senantiasa bergumul dengan masalah-masalah dunia tanpa gentar menghadapi resiko”.

Kemampuan berdialog untuk mendayagunakan sesuatu secara tepat sesuai dengan standar yang jelas dan dapat diterima secara universal. Dalam konteks ini efektivitas menunjukkan taraf mencapai tujuannya secara ideal, tarap efektivitasnya dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti. Pandangan ini memfokuskan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan ukuran yang pasti. hal ini juga menjadi syarat memimpin disaat adanya kewenangan.

Cara-cara Mempertahankan Kekuasaan

Kekuasaan yang telah dilaksanakan melalui saluran-saluran sebagaimana diterangkan di atas memerlukan serangkaian cara atau usaha-usaha untuk mempertahankannya. Setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat, demi stabilnya masyarakat tersebut, akan berusaha untuk mempertahankannya. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukannya adalah antara lain:

Pertama, dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa, dimana peraturan-peraturan tersebut akan menguntungkan penguasa, keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu ada pergantian kekuasaan dari

seseorang penguasa kepada penguasa lain yang baru.

Kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya, yang meliputi agama, ideologi dan seterusnya.

Ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kerja sehingga terjadi mekanisme dalam birokrasi di instansi manapun. Kepemimpinan dalam birokrasi yang dapat berjalan efektif dan terwujud bila antara mereka yang memegang kekuasaan atau wewenang dengan mereka yang dipengaruhi terdapat suatu hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.

Dalam masyarakat kecil, dimana hubungan para masyarakat dapat dilakukan secara pribadi dan langsung, maka hubungan ini tidak akan banyak menemui kesulitan, akan tetapi pada masyarakat yang lebih besar, maka penggunaan kekuasaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya suatu alat atau media penghubung yang teratur dan dapat dipercaya, alat atau media itulah yang disebut dengan birokrasi. Adanya alat penghubung ini maka penggunaan kekuasaan dari suatu pusat pemerintahan, dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih luas dan lebih merata, oleh sebab itu, apabila di dalam suatu masyarakat ada seseorang atau sekelompok orang telah berhasil memusatkan banyak kekuasaan dalam tangannya, maka pengaruh dari kekuasaan itu pada masyarakat umum akan terasa lebih meningkat dan mengekang dibandingkan dengan masa-masa terdahulu.

Keempat, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal, dalam konsolidasi diartikan bahwa sebagai usaha untuk menata kembali dan memperkuat suatu organisasi, usaha ini dilakukan untuk menghindari perpecahan dalam tubuh organisasi. Konsolidasi sisi kedalam akan memperkuat solidaritas sesama anggota yang berhimpun pada organisasi tersebut. Sebaliknya

konsolidasi horizontal akan akan menimbulkan wujud sikap anti pati terhadap lingkungan lainnya.

Kesimpulan

Ruang lingkup komunikasi kekuasaan ketika munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana tujuan kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari luar. Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok. Apabila pada saat tersebut muncul seorang pemimpin, kemungkinan kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Untuk tidak menimbulkan disintegrasi antarkelompok yang berbasis pada organisasi maka diperlukan komunikasi yang mengarah kepada tindakan yang terorganisir. Sebab dalam konteks organisasi, komunikasi bertujuan untuk menentukan kesinambungan didalam organisasi sehingga perilaku dan norma akan tercapai.

Pada umumnya para pemimpin masyarakat tradisional adalah pemimpin-pemimpin di belakang atau ditengah. Jarang sekali yang menjadi pemimpin di muka. Sebaliknya, apabila ditinjau dan ditelaah keadaan di kota-kota besar, susunan masyarakat kota tersebut menghendaki kepemimpinan yang lain dari kepemimpinan pada masyarakat tradisional. Untuk memenuhi kebutuhan setiap golongan masyarakat kota, tak lagi dapat dilaksanakan melalui hubungan-hubungan pribadi. Melainkan kebijaksanaan rasional yang lebih diperlukan.

Kewenangan seorang pemimpin diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam memimpin suatu organisasi. Pemimpin yang memiliki kearifan akan berdampak kesinambungan berjalannya organisasi. Dengan demikian pemimpin yang arif dan bijaksana bisa melihat kondisi dan kebutuhan apa diperlukan dalam organisasi tersebut. Sehingga pemimpin

tersebut akan bertindak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, apakah kebijakan yang diambilnya berorientasi kepada kemajuan organisasi.

Gaya seorang pemimpin berkomunikasi berbeda dengan pendekatan sifat yang menekan pada kharismatik pribadi pemimpin juga berbeda dengan pendekatan keahlian yang hanya menekan kepada birokrasi semata namun bagaimana seorang pemimpin bertindak terhadap anak buahnya yang melihat pada situasi yaitu meletakkan pada perilaku umum dan perilaku kerja, hal ini bagian dari memfasilitasi tercapainya organisasi yang humanis, perilaku hubungan tersebut membuat bawahan menjadi nyaman yang muncul dari diri bawahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Arivin, A. (1962). *Asta Brata Dalam rangka Menejemen*. Lembaga administrasi.
- Adita, I. F., & Ruliana, P. (2022). Komunikasi Politik Dinasti dalam Meningkatkan Elektabilitas Pilkada Tangerang Selatan 2020. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 4(1), 12–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v4i1.96>
- Bouman, J.P. (1984). *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*. Pustaka sarjana.
- Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 87–110. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Carnegie, D. (2010). *Leadership Mastery (sukses memimpin diri sendiri dan orang lain)*. Gramedia.
- Dharma, K. (2016). *Struktur pondamenta pedagogik*. Refika Aditama.
- Khiam, K.S. (1963). *Sendi Sendi Sosiologi (Ilmu Masyarakat)*. Ganaco.
- Kifudyartanta. (2012). *Psikologi Kepribadian paradigma filosofis, tifologis, fisikodimak dan organismik-Holistik*. Pustaka Pelajar.
- Kliem, J. (1956). *The Study Group*. Routledge & Kegan Paul.
- Koetjaraningrat. (1984). *Masyarakat di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Kualitatif (cet.32.ed)*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2014). *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi, Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik (II)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosda Karya.
- Saepudin & Kawuryan, M. W. (2022). Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Transformasional Perempuan dalam Parlemen. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 4(1), 60–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v4i1.97>
- Sedarmayanti. (2018). *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama.
- Setiawati, F. (2020). Manajemen Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(1), 57–66.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Raja Grafindo.
- Sudarman, A. (2018). Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 39–60. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5056>
- Syahputra, I. (2019). *Media Relations, Teori, Strategi, Praktik dan Media Intelijen (I)*. Rajagrafindo Persada.
- Wiber, M. (2015). *Etika Protestan semangat kapitalis*. Narasi.
- Wulan, R. R. (2015). Komunikasi Nonverbal Bangunan Kolonial di Perkebunan Teh Jawa Barat. *Jurnal Sosioteknologi*, 14(3), 221–236.